

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konflik kepentingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan Negara di area kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat disekitar hutan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam. Penelitian ini dilakukan terhadap semua pihak yang terkait dalam konflik kepentingan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagai syarat untuk mendapatkan data dan fakta yang akurat. Batasan penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pengelolaan HKm dengan melihat dinamika konflik kepentingan dan resolusi konflik oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur berjalan secara sustainable atau berkelanjutan hal ini dapat dilihat dari hutan yang lestari dan masyarakat mendapatkan manfaat atas hasil hutan, meskipun ada dinamika dalam proses pengurusan dan pemberian izin oleh Pemerintah.

Keywords : Peran Pemerintah, Sustainability, Hutan Kemasyarakatan.